

RENJA

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022



dpmptsp
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

<https://oss.go.id>



SiCantik

<https://sicantik.go.id>



Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung

<https://simbg.pu.go.id>

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja yang direncanakan, dianggarkan dan disusun untuk tahun 2022 dengan mengevaluasi kinerja ditahun sebelumnya baik dari realisasi anggaran maupun output dan outcome pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan penyusunan RENJA Perubahan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2022.

Muara Sabak, September 2022

Kepala Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom

Pembina / IV.a

NIP. 198209152006042012



Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .. | 9 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 9 |
| 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan | 14 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 15 |
| 2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD | 17 |
| 2.5. Penelusuran Program dan Kegiatan Masyarakat | 21 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 22 |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 22 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 23 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 24 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| BAB V PENUTUP | 31 |

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2021 | 10 |
| Tabel. 2.2. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 18 |
| Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 | 25 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagaimana implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

Perubahan dan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Tahapan Persiapan meliputi Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

orientasi mengenai RKPD dan Renja Perubahan OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitive.

Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut diatas Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan hasil evaluasi kedalam rancangan RKPD yang selanjutnya disampaikan bersamaan dengan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk memperoleh persetujuan. Rancangan RKPD Tahun 2022 dan Surat Edaran yang telah disetujui Kepala Daerah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjadi Pedoman di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum penyusunan Renja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor : 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

TAHUN LALU

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun 2022, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja s/d Semester | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 | |
|--|---|--|--|------------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---|------------------|
| | | | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) |
| | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp.0 | K | Rp. (000) | | |
| Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan Instansi | 88,31 | 3.111.528 | | 403.904 | - | 1.043.328 | - | 694.218 | 88,36 | 879.460 | 88,36 | 3.020.909 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | 5.880 | - | - | - | - | - | - | 100 | 5.080 | 100 | 5.080 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA) | Jumlah dokumen perencanaan | 6 | 3.000 | | | | | | | 4 | 2.200 | 4 | 2.200 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Kinerja | 3 | 2.880 | | | | | | | 3 | 2.880 | 3 | 2.880 |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah monev yang dilaksanakan | 0 | - | | | | | | | | | | - |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah | 100 | 2.507.745 | 25 | 361.089 | 25 | 902.965 | 25 | 572.881 | 25 | 643.677 | 100 | 2.480.612 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 | 2.192.745 | 3 | 296.379 | 3 | 821.455 | 3 | 496.481 | 3 | 566.657 | 12 | 2.180.972 |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pembayaran jasa administrasi keuangan | 12 | 315.000 | 3 | 64.710 | 3 | 81.510 | 3 | 76.400 | 3 | 77.020 | 12 | 299.640 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 35.352 | - | - | - | - | - | - | 96,77 | 34.080 | 97 | 34.080 |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 31 | 35.352 | - | - | - | - | - | - | 30 | 34.080 | 30 | 34.080 |
| 1.3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 239.313 | 13 | 12.240 | 13 | 43.382 | 26 | 55.528 | 48 | 91.530 | 100 | 202.680 |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan | 4 | 2.323 | | | | | | | 4 | 2.323 | 4 | 2.323 |

Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor | 1 | 47.612 | - | 4.915 | | 10.871 | | 18.796 | 1 | 13.012 | 1 | 47.594 |
| 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan | 10 | 39.195 | 3 | 2.425 | 3 | 9.308 | 3 | 17.974 | 1 | 9.487 | 10 | 39.194 |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pembayaran tagihan surat kabar | 12 | 5.400 | 3 | 400 | 3 | 1.700 | | - | 6 | 3.300 | 12 | 5.400 |
| 1.4.5 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Penyediaan makan minum tamu | 12 | 4.500 | - | | | | | | 12 | 4.500 | 12 | 4.500 |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD | 12 | 140.282 | 3 | 4.500 | 3 | 21.502 | 3 | 16.435 | 3 | 61.231 | 12 | 103.669 |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | 70.268 | 7,14 | 1.500 | 50,00 | 32.045 | 14,29 | 4.725 | 21,43 | 28.895 | 92,86 | 67.165 |
| 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit) | 0 | - | | | - | - | | | | | - | - |
| 1.5.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | 14 | 70.268 | 1 | 1.500 | 7 | 32.045 | 2 | 4.725 | 3 | 28.895 | 13 | 67.165 |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 70.950 | 17,55 | 10.258 | 33 | 12.919 | 27 | 11.751 | 48 | 16.982 | 125 | 51.910 |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 495 | 4.950 | 50 | 500 | 200 | 2.000 | 70 | 700 | 175 | 1.750 | 495 | 4.950 |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | 66.000 | 3 | 9.758 | 3 | 10.919 | 3 | 11.051 | 3 | 15.232 | 12 | 46.960 |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | 182.020 | 33,33 | 18.816 | 33 | 52.018 | 33 | 49.333 | - | 59.215 | 100 | 179.382 |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 7 | 130.640 | 7 | 18.816 | - | 27.018 | | 30.043 | | 52.125 | 7 | 128.002 |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin | 1 | 11.380 | | | - | - | 1 | 4.290 | | 7.090 | 1 | 11.380 |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara | 1 | 40.000 | | | 1 | 25.000 | | 15.000 | | | 1 | 40.000 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 13 | - | 33,5 | 22,3 | 88 | 28 | 88 | 97 |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal | 100 | 81.434 | - | 6.340 | - | 12.710 | - | 8.230 | 100 | 44.911 | 100 | 72.191 |

Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------|---------|----------|---------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| | | Yang Tersedia | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 100 | 81.434 | 6.340 | - | 12.710 | 8.230 | 100 | 44.911 | 100 | 72.191 | | |
| 2.1.1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi | 1 | 81.434 | 6.340 | - | 12.710 | 8.230 | 1 | 44.911 | 1 | 72.191 | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | 8 | | 16 | | 100 | 55 | 100 | 79 | | |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan (Kali) | 0 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | | |
| 2.1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi yang (Kali) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi yang dilaksanakan(Kali) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,31 | 157.587 | - | 88,38 | 20.718 | - | 6.039 | 88 | 99.660 | 88,47 | 126.418 | |
| 4.1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,31 | 157.587 | | 88,38 | 20.718 | - | 6.039 | 88,47 | 99.660 | 88,47 | 126.418 | |
| 4.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin) | 650 | 150.662 | | 300 | 20.718 | 430 | 6.039 | 1.196 | 93.007 | 1.926 | 119.764 | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,31 | 6.925 | | 88,38 | | | | 88,47 | 6.653 | 88,47 | 6.653 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | 100,08 | 13 | | | 88 | 63 | 189 | 76 | |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Nilai Investasi (dalam juta rupiah) | 148.710 | 384.408 | - | - | - | 155.376 | 83.570 | 315.865 | 171.500 | 315.865 | 255.070 | |

Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------------------|----|------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| 5.1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali) | 63 | 384.408 | - | - | - | 16,00 | 83.570 | 63 | 171.500 | 79 | 255.070 |
| 5.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 | 94.350 | - | - | 11 | 9.357 | 24 | 51.303 | 35 | 60.661 | |
| 5.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali) | 7 | 193.458 | - | - | 4 | 72.343 | 3 | 71.664 | 7 | 144.007 | |
| 5.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 | 96.600 | - | - | 1 | 1.869 | 36 | 48.533 | 37 | 50.402 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | - | - | 104 | 22 | 100 | 45 | 204 | 66,4 | |
| 3 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Data Dan Informasi Yang Valid | 100 | 42.354 | - | - | - | 54 | 6.821 | 46 | 34.278 | 100 | 41.099 |
| 3.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%) | 100 | 42.354 | - | - | - | 54 | 6.821 | 46 | 34.278 | 100 | 41.099 |
| 3.1.1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen) | 13 | 42.354 | - | - | 7 | 6.821 | 6 | 34.278 | 13 | 41.099 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | - | - | - | 54 | 6.821 | 46 | 34.278 | 100 | 41.099 |
| Predikat kinerja | | | | | SR | SR | ST | | | SR | SR | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | 3.777.311 | | | | | | | | | 3.515.686 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) | | | | | | 20,0 | | 31,7 | | 84,6 | | 136,3 | 93,1 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) | | | | | | | | | | | | ST | ST |

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal.
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Peningkatan penanaman

modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun agenda Reformasi Birokrasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Penanaman Modal.
3. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas.
4. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat, pemohon atau pelaku usaha tentang perizinan online.
6. Belum adanya RDTR atau pemetaan potensi wilayah.
7. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal.
8. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan investasi.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan baik melalui Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui perizinan online.

3. Mengoptimalkan sosialisasi penanaman modal dan perizinan baik kepada aparatur atau petugas di kecamatan maupun masyarakat pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Mengajukan permohonan penambahan personil atau aparatur ke Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD), dan Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan Diklat penanaman modal dan PTSP serta Bimtek lainnya untuk menunjang peningkatan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Memaksimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
6. Meminimalkan jarak dalam melakukan kegiatan penanaman modal dan perizinan melalui kegiatan pelayanan perizinan di tempat.

2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviw terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|-----------|--|----------------|----------------------|--|-----------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah | DPMP-PTSP | Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP | 100% | Rp. 3.669.238.623,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintah | DPMP-PTSP | Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP | 100% | Rp. 3.761.866.130,00 | |
| | | | Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu | Tepat Waktu | | | | Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu | Tepat Waktu | | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 9.575.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 7.775.000,00 | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA) | DPMP-PTSP | Jumlah dokumen perencanaan | 4 Dok | Rp. 5.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA) | DPMP-PTSP | Jumlah dokumen perencanaan | 4 Dok | Rp. 5.000.000,00 | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | DPMP-PTSP | Jumlah dokumen Laporan Kinerja | 4 Dok | Rp. 4.575.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | DPMP-PTSP | Jumlah dokumen Laporan Kinerja | 3 Dok | Rp. 2.775.000,00 | |
| 1.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah | 100 % | Rp. 2.611.244.199,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah | 100 % | Rp. 2.589.541.073,00 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DPMP-PTSP | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 Tahun | Rp. 2.277.764.199,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DPMP-PTSP | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 Tahun | Rp. 2.282.661.073,00 | |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD | DPMP-PTSP | Pembayaran jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | Rp. 333.480.000,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD | DPMP-PTSP | Pembayaran jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | Rp. 306.880.000,00 | |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 85.352.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 102.324.530,00 | |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | DPM-PTSP | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel) | 64 Stel | Rp. 55.352.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | DPMP-PTSP | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel) | 64 Stel | Rp. 57.324.530,00 | |
| 1.3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | DPM-PTSP | Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang) | 7 Orang | Rp. 30.000.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | DPMP-PTSP | Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang) | 9 Orang | Rp. 45.000.000,00 | |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPM-PTSP | Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 468.474.170,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Rp. 380.188.295,00 | |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPM-PTSP | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan | 4 Jenis | Rp. 2.950.100,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPMP-PTSP | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan | 5 Jenis | Rp. 18.950.100,00 | |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPM-PTSP | Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor | 1 Tahun | Rp. 57.688.203,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPMP-PTSP | Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor | 1 Tahun | Rp. 63.780.060,00 | |
| 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPM-PTSP | Jumlah jenis barang cetakan | 10 Jenis | Rp. 42.140.667,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPMP-PTSP | Jumlah jenis barang cetakan | 10 Jenis | Rp. 40.308.135,00 | |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPM-PTSP | Pembayaran tagihan surat kabar | 12 Bulan | Rp. 8.400.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPMP-PTSP | Pembayaran tagihan surat kabar | 12 Bulan | Rp. 8.400.000,00 | |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPM-PTSP | Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD | 1 Tahun | Rp. 357.295.200,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPMP-PTSP | Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD | 1 Tahun | Rp. 248.750.000,00 | |
| 1.5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPM-PTSP | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | Rp. 180.353.254,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | Rp. 176.157.232,00 | |
| 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPM-PTSP | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit) | 0 Unit | Rp. 78.930.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPMP-PTSP | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit) | 0 Unit | Rp. - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|------------------|--------------------|---|-----------|--|------------------|--------------------|--|
| 1.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPM-PTSP | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | 43 Unit | Rp. 101.423.254,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPMP-PTSP | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | 56 Unit | Rp. 176.157.232,00 | |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPM-PTSP | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Rp. 77.000.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Rp. 65.000.000,00 | |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPM-PTSP | Jumlah Materai | 500 Lembar | Rp. 5.000.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMP-PTSP | Jumlah Materai | 500 Lembar | Rp. 5.000.000,00 | |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik | DPM-PTSP | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Rp. 72.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik | DPMP-PTSP | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Rp. 60.000.000,00 | |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPM-PTSP | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 % | Rp. 237.240.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMP-PTSP | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 % | Rp. 440.880.000,00 | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | DPM-PTSP | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 7 Unit | Rp. 134.480.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | DPMP-PTSP | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 7 Unit | Rp. 128.120.000,00 | |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPM-PTSP | Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin | 26 Unit | Rp. 12.760.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPMP-PTSP | Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin | 26 Unit | Rp. 12.760.000,00 | |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DPM-PTSP | Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | Rp. 90.000.000,00 | Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DPMP-PTSP | Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | Rp. 300.000.000,00 | |
| 2. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | DPM-PTSP | Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia | 33,33 % | Rp. 189.470.200,00 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia | 33,33 % | Rp. 189.558.000,00 | |
| 2.1 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPM-PTSP | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 189.470.200,00 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPMP-PTSP | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 189.558.000,00 | |
| 2.1.1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | DPM-PTSP | Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 54.803.000,00 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | DPMP-PTSP | Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 74.140.000,00 | |
| 2.1.2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPM-PTSP | Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 134.667.200,00 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMP-PTSP | Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen) | 1 Dok | Rp. 115.418.000,00 | |
| 3. | Program Pelayanan Penanaman Modal | DPM-PTSP | Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan | 1,2 % | Rp. 191.974.653,00 | Program Pelayanan Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan | 1,2 % | Rp. 191.974.603,00 | |
| 3.1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPM-PTSP | Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan | 450 Pelaku Usaha | Rp. 191.974.653,00 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMP-PTSP | Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan | 450 Pelaku Usaha | Rp. 191.974.603,00 | |
| 3.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPM-PTSP | Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin) | 650 Izin | Rp. 185.049.885,00 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMP-PTSP | Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin) | 650 Izin | Rp. 185.049.835,00 | |
| 3.1.2 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | DPM-PTSP | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang) | 150 Orang | Rp. 6.924.768,00 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | DPMP-PTSP | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang) | 150 Orang | Rp. 6.924.768,00 | |
| 4. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | DPM-PTSP | Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM | 2% | Rp. 449.200.140,00 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM | 2% | Rp. 472.349.350,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---|---------|----------------------|--|-----------|---|---------|--------------------|----------------------|
| 4.1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPM-PTSP | Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali) | 60 Kali | Rp. 449.200.140,00 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMP-PTSP | Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali) | 60 Kali | Rp. 472.349.350,00 | |
| 4.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPM-PTSP | Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 Kali | Rp. 111.097.972,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 Kali | Rp. 81.394.350,00 | |
| 4.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPM-PTSP | Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali) | 4 Kali | Rp. 266.214.736,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali) | 4 Kali | Rp. 322.935.000,00 | |
| 4.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPM-PTSP | Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 Kali | Rp. 71.887.432,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | 28 Kali | Rp. 68.020.000,00 | |
| 5. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | DPM-PTSP | Persentase Data Dan Informasi Yang Valid | 100 % | Rp. 113.022.920,00 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | DPMP-PTSP | Persentase Data Dan Informasi Yang Valid | 100 % | Rp. 112.933.500,00 | |
| 5.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPM-PTSP | Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%) | 33,33 % | Rp. 113.022.920,00 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMP-PTSP | Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%) | 33,33 % | Rp. 112.933.500,00 | |
| 5.1.1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPM-PTSP | Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen) | 13 Dok | Rp. 113.022.920,00 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMP-PTSP | Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen) | 13 Dok | Rp. 112.933.500,00 | |
| JUMLAH | | | | | Rp. 4.612.906.536,00 | JUMLAH | | | | | Rp. 4.728.681.583,00 |

2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Dikarenakan hal tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jambung Timur, tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari perangkat Daerah Kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada UU NO 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kebijakan dasar penanaman modal adalah, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 2). Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 1). Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. (Pasal 6 ayat 2).

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (Pasal 7). Dalam hal ini Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar). Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP 2022

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang;
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota;
8. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi.
2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Agar sasaran ini dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada:

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk dapat menjalankan fungsi yang terarah dan terkendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memprogramkan tugas-tugas Pelayanan untuk tahun 2022 yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta mengurangi permasalahan dan kelemahan yang ada. Penyusunan kegiatan berisikan tindakan nyata yang dilakukan dalam waktu selama satu tahun Anggaran yang penyusunannya berdasarkan pada Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Renca Tahun 2023 | | |
|------|---|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 18 | Program Penunjang Urusan Pemerintah | DPMP-PTSP | 100% | Rp. 3.761.866.130,00 | APBD | | 100% | Rp. 3.708.944.037,00 | |
| | | | | Tepat Waktu | | | | Tepat Waktu | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | 100 % | Rp. 7.775.000,00 | APBD | 100 % | Rp. 11.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA) | DPMP-PTSP | 4 Dok | Rp. 5.000.000,00 | APBD | 4 Dok | Rp. 6.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | DPMP-PTSP | 3 Dok | Rp. 2.775.000,00 | APBD | 3 Laporan | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | 100 % | Rp. 2.589.541.073,00 | APBD | 100 % | Rp. 2.765.284.037,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DPMP-PTSP | 1 Tahun | Rp. 2.282.661.073,00 | APBD | 21 Tahun | Rp. 2.365.284.037,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD | DPMP-PTSP | 12 Bulan | Rp. 306.880.000,00 | APBD | 5 Dok | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMP-PTSP | 100 % | Rp. 102.324.530,00 | APBD | 100 % | Rp. 90.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | DPM-PTSP | 64 Stel | Rp. 57.324.530,00 | APBD | 2 Paket | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | DPM-PTSP | 9 Orang | Rp. 45.000.000,00 | APBD | 7 Orang | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPM-PTSP | 100 % | Rp. 380.188.295,00 | APBD | 100 % | Rp. 422.400.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPM-PTSP | 5 Jenis | Rp. 18.950.100,00 | APBD | 1 Paket | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPM-PTSP | 1 Tahun | Rp. 63.780.060,00 | APBD | 2 Paket | Rp. 60.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|--|----------|------------|--------------------|------|--|------------|--------------------|
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan | DPM-PTSP | 10 Jenis | Rp. 40.308.135,00 | APBD | | 4 Dok | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pembayaran tagihan surat kabar | DPM-PTSP | 12 Bulan | Rp. 8.400.000,00 | APBD | | 12 Bulan | Rp. 8.400.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD | DPM-PTSP | 1 Tahun | Rp. 248.750.000,00 | APBD | | 40 Laporan | Rp. 284.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | DPM-PTSP | 100 % | Rp. 176.157.232,00 | APBD | | 100 % | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit) | DPM-PTSP | 0 Unit | Rp. - | APBD | | 3 Unit | Rp. 40.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | DPM-PTSP | 56 Unit | Rp. 176.157.232,00 | APBD | | 10 Unit | Rp. 90.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPM-PTSP | 100 % | Rp. 65.000.000,00 | APBD | | 100 % | Rp. 77.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | DPM-PTSP | 500 Lembar | Rp. 5.000.000,00 | APBD | | 1 Paket | Rp. 5.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | DPM-PTSP | 12 Bulan | Rp. 60.000.000,00 | APBD | | 12 Bulan | Rp. 72.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | DPM-PTSP | 100 % | Rp. 440.880.000,00 | APBD | | 100 % | Rp. 213.260.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | DPM-PTSP | 7 Unit | Rp. 128.120.000,00 | APBD | | 9 Unit | Rp. 138.260.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin | DPM-PTSP | 26 Unit | Rp. 12.760.000,00 | APBD | | 26 Unit | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara | DPM-PTSP | 1 Unit | Rp. 300.000.000,00 | APBD | | 1 Unit | Rp. 60.000.000,00 |
| 2 | 18 | 2 | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia | DPM-PTSP | 33,33 % | Rp. 189.558.000,00 | APBD | | 50 % | Rp. 176.160.549,00 |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen) | DPM-PTSP | 1 Dok | Rp. 189.558.000,00 | APBD | | 1 Dok | Rp. 176.160.549,00 |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen) | DPM-PTSP | 1 Dok | Rp. 74.140.000,00 | APBD | | 0 Dok | Rp. - |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen) | DPM-PTSP | 1 Dok | Rp. 115.418.000,00 | APBD | | 1 Dok | Rp. 176.160.549,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|---|--|----------|---------------|--------------------|------|--|-------------------|--------------------|
| 2 | 18 | 4 | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan | DPM-PTSP | 1,2 % | Rp. 191.974.603,00 | APBD | | 2 % | Rp. 191.974.603,00 |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan | DPM-PTSP | 450 Pelaku Us | Rp. 191.974.603,00 | APBD | | 450 Pelaku Usaha | Rp. 191.974.603,00 |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin) | DPM-PTSP | 650 Izin | Rp. 185.049.835,00 | APBD | | 300 Pelaku Usaha | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non | DPM-PTSP | 150 Orang | Rp. 6.924.768,00 | APBD | | 150 Orang | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 18 | 5 | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM | DPM-PTSP | 0 | Rp. 472.349.350,00 | APBD | | 0 | Rp. 472.791.196,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali) | DPM-PTSP | 60 Kali | Rp. 472.349.350,00 | APBD | | 60 Kali | Rp. 472.791.196,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | DPM-PTSP | 28 Kali | Rp. 81.394.350,00 | APBD | | 30 Kegiatan Usaha | Rp. 120.000.000,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali) | DPM-PTSP | 4 Kali | Rp. 322.935.000,00 | APBD | | 30 Pelaku Usaha | Rp. 262.791.196,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali) | DPM-PTSP | 28 Kali | Rp. 68.020.000,00 | APBD | | 40 Kegiatan Usaha | Rp. 90.000.000,00 |
| 2 | 18 | 6 | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Data Dan Informasi Yang Valid | DPM-PTSP | 100 % | Rp. 112.933.500,00 | APBD | | 100 % | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%) | DPM-PTSP | 33,33 % | Rp. 112.933.500,00 | APBD | | 50 % | Rp. 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|------|---|---|---|----------|---------------|----------------------|------|--|--------|----------------------|
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen) | DPM-PTSP | 13 Dok | Rp. 112.933.500,00 | APBD | | 13 Dok | Rp. 50.000.000,00 |
| JUMLAH | | | | | | | | | Rp. 4.728.681.583,00 | | | | Rp. 4.599.870.385,00 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 serta pendanaannya dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil yang benar-benar dikedepankan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya seoptimal mungkin dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada serta dukungan dari seluruh Instansi terkait untuk mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga terwujud Pelayanan Prima di Bidang Penanaman modal dan Perizinan.

Muara Sabak, September 2022

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom

Pembina / IV.a
NIP. 198209152006042012